

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Cetakan Ke-2), Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2016, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, 2018, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Jakarta: Media Pressindo.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Nasional. Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- _____, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, edisi Revisi, (Cetakan Ke-10), Jakarta: Djambatan.
- _____, 2006, *Hukum Agraria Indonesia*, (Cetakan Ke-17), Jakarta: Djambatan.
- Herman Slat, 2007, *Masalah Tanah di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Lembaga Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Julius Sembiring, 2016, *Tanah Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Lubis, Mhd Yamin, 2008, *Hukum Pndaftaran Tanah. Bandung* : Mandar Maju.

- Maria S.W. Sumardjono, 2010, *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Yogyakarta: Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda, Yogyakarta.
- Mukadir Iskandar Syah, 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Parlindungan, A.P, 1991, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata cara PPAT*, Bandung : CV. Mandar Maju
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Urip Santoso, 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- _____, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Cetakan Ke-4), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-Negeraan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan,

Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Keputusan Preseiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok

Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah

Asal Konversi Hak-Hak Barat

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang

Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak

Indonesia Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah

C. Jurnal, Skripsi, dan lain-lain

Auri, 2014, “Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2.

Purbandari, 2021, “Kekuatan Pembuktian *Verponding* Indonesia Sebagai Bukti Kepemilikan Dalam Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Law Of Faculti MPU Tantular University*, Volume 5 No. 1.

Riyadi, Bambang Slamet, 2017, *Law of agrarian conflict and resolution effort: A claim dispute of Eigendom verponding Land*, *International Jurnal of Law*, Volume 3, Issue 3, May 2017.

Sahnan, 2019, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 3.

D. Sumber Lainnya

<https://hariansinggalang.co.id/gubernur-keluarkan-surat-ex-verponding-adalah-tanah-negara/> , diunduh pada tanggal 24 Februari 2023, pukul 09.00.

<https://repository.unair.ac.id/33741/5/5.20/BAB/2020/PENDAHULUAN.pdf.>, diunduh pada tanggal 20 September 2023, pukul 09.30.

Hery Shietra, 2017, Legal Consultant pada Shietra & Partners hukum.com, Alas Hak Artinya Dasar Keberadaan. <https://www.hukumhukum.com/2017/03/alas-hak-dasar-keberadaan.html>, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.

